



SEJARAH BALAI KIPM BANJARMASIN

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin memiliki sejarah panjang dalam mendukung sektor perikanan di Kalimantan Selatan. Perjalanan panjang Balai KIPM Banjarmasin tidak lepas dari dinamika kelembagaan karantina ikan dan pengawasan mutu hasil perikanan di Indonesia. Transformasi kelembagaan ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah untuk memperkuat sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor.

Sebelum Tahun 2002

Awalnya, pelayanan karantina ikan di Kalimantan Selatan dilakukan melalui Wilayah Kerja (Wilker) Bandara Sepinggang, yang berada di bawah naungan Balai Karantina Ikan Sepinggang Balikpapan. Pada masa ini, pelayanan masih bersifat terbatas, khususnya di bandara, untuk mendukung lalu lintas ikan dan hasil perikanan.

Tahun 2002 – 2005

Dengan meningkatnya lalu lintas perikanan di Kalimantan Selatan, dibentuk Pos Karantina Ikan Syamsudin Noor di Banjarmasin. Pos ini kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Stasiun Karantina Ikan Kelas I Syamsudin Noor Banjarmasin. Perubahan ini menandai langkah awal kehadiran kelembagaan yang lebih permanen dalam menjalankan fungsi karantina ikan di daerah.



SEJARAH BALAI KIPM BANJARMASIN

Tahun 2011

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2011, kelembagaan ini kembali ditingkatkan menjadi Balai Karantina Ikan Kelas II Syamsudin Noor Banjarmasin, yang selanjutnya dikenal sebagai Balai KIPM Kelas II Banjarmasin. Dengan status ini, fungsi pengawasan tidak hanya terbatas pada karantina, tetapi juga mulai diperluas ke bidang mutu hasil perikanan.

Tahun 2017 – 2023

Melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PERMEN KP.54/PERMEN-KP/2017, kelembagaan resmi menjadi Balai KIPM Banjarmasin. Tugas dan fungsi lembaga ini mencakup dua aspek utama, yaitu karantina ikan serta pengawasan mutu hasil perikanan, yang dijalankan dalam rangka melindungi sumber daya ikan, menjaga kelestarian lingkungan, serta menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan untuk konsumsi dan perdagangan.

Tahun 2023 – Sekarang

Sebagai bagian dari restrukturisasi organisasi di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai KIPM Banjarmasin bergabung ke dalam struktur Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP). Transformasi ini menjadikan fokus kelembagaan lebih terarah pada pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan, guna memastikan produk perikanan Indonesia memenuhi standar keamanan pangan, standar ekspor, serta mampu bersaing di pasar internasional.